

news analysis

Laily Khainur
Direktur Gemawan

Rakyat Kritis

SETIAP tahun pemerintah daerah menghadapi masalah seperti itu. Permasalahan pencatatan aset selalu saja terjadi dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini karena pencatatan yang tidak jelas dan adanya upaya memanfaatkan aset negara untuk kepentingan lain. Seharusnya, ada langkah-langkah perbaikan dari pihak pemerintah daerah. Semua harus diperjelas. Kalau memang itu tanah atau bangunan milik negara, maka pemanfaatannya dan pendapatannya harus masuk ke kas negara atau kas daerah. Selama ini, kita tidak mengetahui di mana saja aset daerah itu dan ke mana masuknya dana hasil pemanfaatan kekayaan negara tersebut. Maka, wajar saja kalau kemudian

■ Bersambung ke Hal 7

Temuan BPK

- Perjanjian pemanfaatan barang dengan pihak ketiga lemah dan belum menguntungkan Pemprov, seperti dengan PT CPM terkait pemanfaatan lahan eks KONI senilai Rp 8 miliar.
- Barang milik Pemprov tak diketahui keberadaannya Rp 1,95 miliar.
- Penggunaan dan pemanfaatan aset peralatan dan mesin tidak sesuai dengan ketentuan Rp 2,89 miliar.
- Pengamanan tanah milik Pemprov Kalbar yang belum optimal atau bersertifikat Rp 79,9 miliar.

- Mitra kerjasama bangun guna serah (BOT) belum dikenakan retribusi kekayaan daerah seperti dengan PT NSI, Restoran SB dan Rumah Makan AU.
- Aset hibah atau bantuan pemerintah pusat tidak jelas statusnya Rp 3,84 miliar.
- Tanah milik Pemprov Kalbar yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp 917 juta.

Sumber: Keterangan Rizal Djali, Anggota BPK
GRAFIK: ENRO

Rakyat Kritis

ada temuan BPK karena selama ini tidak ketahuan ke mana perginya pendapatan tersebut.

Semestinya, pengelola aset itu diberi arahan. Contohnya, kalau ada teman investasi dan menggunakan aset negara, seharusnya ada penjelasan tentang adanya pemasukan dan itu harus masuk ke kas negara.

Sebenarnya, ini hal yang mudah untuk diseriusi. Tapi, selama ini tidak *genah* dalam mengurus aset ini. Misalnya, kasus aset KONI di Jl Ahmad Yani, kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Nanti jangan-jangan tiba-tiba dibangun dan pendapatannya tidak jelas ke mana.

Masyarakat juga harus mulai peduli. Selama ini masyarakat beranggapan bahwa itu aset negara, biarlah diurus oleh negara. Kita rakyat seolah tidak punya hak untuk mengetahuinya. Padahal ini terkait dengan kepentingan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tentu akan meningkat dengan meningkatnya retribusi atau pendapatan dari aset daerah itu.

Jika dana tersebut tidak dikorupsi, tentu saja bisa lebih banyak anggaran yang digunakan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan dan peningkatan kesehatan.

Selama ini, masyarakat tidak tahu karena tidak ada pencatatan yang baik. Padahal, ini akuntansi yang sederhana. Ada aset, ada uang masuk, ada uang keluar untuk biaya pengelolaannya, lalu *di-balance*.

Jadi, masyarakat harus kritis. Masyarakat harus mulai memantau semua proses pendapatan dari aset tersebut. Kalau tidak, setiap tahun akan terjadi masalah seperti ini.

Dan sebagai seorang pemimpin, tentu dia akan bangga kalau pelaporannya berada dalam posisi *preformance*

yang baik.

Dalam istilah BPK, mungkin WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pemimpin harusnya bangga diberi nilai seperti itu.

Bagaimana mencapai pelaporan yang baik itu, di antaranya tentu dengan *performance* dan pencatatan yang baik, serta tidak ada tindak pidana korupsi di dalamnya. Ini baru audit aset atau kekayaan. Bagaimana dengan audit kinerja?

Ini tergantung *political will* pemerintah daerah. Kalau memang itu aset negara, maka itu harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. Kalau aset itu digunakan dengan pihak lain, maka harus ada perhitungan keuntungan.

Yang harus diwaspadai adalah korupsi politik, karena ini saling terkait. Sengkarut aset ini sebenarnya bukan sekadar catat-mencatat, tapi soal kepentingan politik para pihak yang terlibat di dalamnya. (nip)

Sambungan Hal. 1